

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019)

Firda Monica*, Chairul Sa'roni

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

[*Firda0499@gmail.com](mailto:Firda0499@gmail.com)

Abstract

This study was conducted to analyze the effect of PAD, DBH, DAU, DAK on Regional Expenditures and Economic Growth. This research was conducted in all regencies/cities in South Kalimantan Province within a period of 10 years, namely from 2010-2019. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the website of the General Directorate of Balance (www.djpk.kemenkeu.go.id). The type of data studied is panel data with an analytical method that is path analysis. The results showed that PAD, DBH, DAU, and DAK had a significant effect on Regional Expenditures. PAD and Regional Expenditures have a significant effect on Economic Growth. Meanwhile, DBH, DAU, and DAK do not have a significant effect on Economic Growth. Regional Expenditures can be a mediator between PAD, DBH, DAU, and DAK on Economic Growth.

Keywords: Local Government Revenue; Balancing Fund; Regional Expenditures; Economic Growth

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2010-2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs Direktorat Umum Perimbangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). Jenis data yang diteliti adalah data panel dengan metode analisis yaitu analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. PAD dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, DBH, DAU, dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Daerah mampu menjadi mediator antara PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; Belanja daerah; Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Dengan adanya pemberlakuan sistem otonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan program andalan daerah sehingga mampu mendorong kemandirian dan daya saing daerah serta menambah kekuatan fiskal daerah. Dalam menjalankan pelaksanaan kewenangan otonomi daerah, peningkatan potensi penerimaan daerah merupakan aspek penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan serta kegiatan pemerintahannya (Enceng et al., dalam Susi & Asmara, 2014).

Menurut Halim 2011 dalam (Mahardika & Sri Artini, 2014) menjelaskan bahwa Suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi memiliki ciri utama yaitu tingkat kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus mampu menggunakan serta keuangannya sendiri dalam

membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan yang ada di daerahnya, dan mampu meminimalisir penerimaan dana yang diberikan dari pemerintah pusat agar daerah tidak memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga sumber keuangannya harus berpusat pada pendapatan asli daerahnya. Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah setiap pemerintah daerah perlu memberikan peningkatan terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya secara demokratis, berkeadilan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu dalam mengelola potensi daerah berupa SDM (sumber daya alam), SDM (sumber daya manusia) serta pengoptimalan potensi-potensi sumber daya keuangannya (Hendawati et al., 2018).

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tersebut diharapkan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara efektif dan efisien serta memainkan peranannya dalam membuka peluang dalam memajukan daerah.

Dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan indikator utama yang dilihat yaitu perolehan dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu wilayah. Dengan semakin besar penerimaan PAD yang didapatkan oleh pemerintah daerah maka wilayah tersebut dapat dikatakan mandiri. Menurut BPS dalam (Alfi & Nuraini, 2018) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi permasalahan dalam ketergantungan terhadap subsidi dari pemerintah pusat yang ditunjukkan oleh tingkat bantuan pemerintah pusat yang masih cukup besar baik dari sudut anggaran pemerintah daerah atau anggaran rutin, berupa subsidi daerah otonom. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu dapat dilihat dari segi belanja daerah. Suatu daerah otonom dapat dikatakan baik apabila mampu melaksanakan investasinya dari belanja daerah yang dianggarkan secara tepat (Koswara dalam Iqbal et al., 2020).

Dalam melaksanakan roda perekonomian, pemerintah memerlukan modal yang diperoleh dari potensi daerahnya sendiri serta dana transfer yang didapat dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan perekonomian dengan baik apabila dalam pemenuhan modalnya daerah hanya bergantung pada transfer pusat saja sebagai sumber keuangannya, hal tersebut akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan daerahnya. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun (2014) disebutkan Pemerintah Pusat menstransfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pelaksanaan dalam kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan pemerintah daerah mampu memaksimalkan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat secara efektif dan efisien dalam menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Dengan peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah yang makin meningkat, sehingga pemerintah provinsi atau kabupaten/kota tidak memungkinkan apabila bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Sehingga dalam menutupi kebutuhan belanja daerah tersebut, diberikanlah dana transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diharapkan mampu menunjang kebutuhan belanja daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonominya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Serta pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi, daerah memiliki kesempatan yang luas untuk menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat daerahnya.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dibayarkan melalui kas umum daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perekonomian pada suatu daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota), pertumbuhan ekonomi adalah salah satu parameter yang dipakai untuk melihat tingkat keberhasilan suatu pembangunan. Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi yaitu penambahan kemampuan yang dimiliki suatu negara dalam menyediakan barang-barang ekonomi bagi masyarakat, dikarenakan adanya perkembangan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya (Talangamin et al., 2018).

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang No.33 Tahun (2004), PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan daerah bersangkutan guna membiayai kegiatannya.

Dana Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang No.33 Tahun (2004), DBH adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum

Dalam Undang-Undang No.33 Tahun (2004), DAU diartikan sebagai dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang No.33 Tahun (2004), DAK yaitu alokasi dari APBD yang diberikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah (2013), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh)". Hasil analisisnya menunjukkan PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, sementara DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Kadek Rosita Dewi, Putu Kepramareni, Ni Luh Gde Novitasari (2017), Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Penelitian I Putu Irvan dan Ni Luh Karmini (2013), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening". Pada penelitiannya diperoleh hasil bahwa PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja modal. PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun

belanja modal memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE

Ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan pada pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan *data time series*.

Definisi Operasional Variabel

Belanja Daerah

Dana yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Menggunakan data realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2010-2019 dalam satuan miliar rupiah.

Pertumbuhan Ekonomi

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu. Dinyatakan dalam satuan persen.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Menggunakan data realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, dalam satuan miliar rupiah.

Dana Bagi Hasil

Dialokasikan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Menggunakan data realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, dalam satuan miliar rupiah.

Dana Alokasi Umum

Dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Menggunakan data realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, dalam satuan miliar rupiah.

Dana Alokasi Khusus

Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Menggunakan data realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, dalam satuan miliar rupiah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS Prov. Kalsel dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur adalah suatu bentuk pengembangan langsung dalam regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (Sarwono Jonathan, 2007). Untuk menganalisis hasil data, digunakan teknik analisis jalur dengan menggunakan program *E-Views 10 version*. Persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut

Model Substruktural I

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_1$$

Model Substruktural II

$$Y_2 = \alpha + \beta_5 X_1 + \beta_6 X_2 + \beta_7 X_3 + \beta_8 X_4 + \beta_9 Y_1 + \varepsilon_2$$

Dimana:

Y1 : Belanja Daerah
Y2 : Pertumbuhan Ekonomi
X1 : PAD
X2 : DBH
X3 : DAU
X4 : DAK
 ϵ_1, ϵ_2 : Standar Error
 β_{1-9} : Koefisien Jalur masing-masing variabel

HASIL DAN ANALISIS

Analisis Deskriptif Statistik

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
PAD	130	14,348,700,000	330,718,653,036	103,870,203,871	66,630,292,898
DBH	130	76,746,895,175	1,137,787,875,768	247,033,863,127	156,692,591,696
DAU	130	177,090,317,000	754,121,572,000	458,633,172,979	125,338,178,739
DAK	130	0	322,105,000,000	101,034,675,825	81,436,832,707
BD	130	416,351,675,802	1,912,511,888,377	1,072,847,936,296	354,653,455,123
PE	130	2.41%	8.84%	5.26%	1.26%
Valid N (listwise)	130				

Sumber : hasil olah data dengan Eviews10, 2021

Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata PAD sebesar 103,870,203,871 rupiah dengan standar deviasi sebesar 66,630,292,898 rupiah. DBH memiliki nilai rata-rata dana sebesar 247,033,863,127 rupiah dengan standar deviasi sebesar 156,692,591,696 rupiah. DAU memiliki nilai rata-rata dana sebesar 458,633,172,979 rupiah dengan standar deviasi sebesar 125,338,178,739 rupiah. DAK memiliki nilai rata-rata dana sebesar 101,034,675,825 rupiah dengan standar deviasi sebesar 81,436,832,707 rupiah. Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata dana sebesar 1,072,847,936,296 rupiah dengan standar deviasi sebesar 354,653,455,123 rupiah. pertumbuhan ekonomi memiliki nilai rata-rata sebesar 5.26% dengan standar deviasi 1.26%.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Karena jenis penelitian ini adalah data panel, maka sebelum model analisis jalur digunakan terlebih dahulu dilakukan uji regresi pemilihan model dengan uji *chow*, uji *hausmant* dan uji *Lagrangge Multiplier*. Dari hasil yang ditelaah dilakukan maka model yang terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *common effect*. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua asumsi terpenuhi.

Pengujian pengaruh langsung dapat dilihat pada hasil uji regresi linier substruktural I dan substruktural II pada tabel 2 dan 3 berikut:

1. Regresi Linier Substruktural I (Belanja Daerah, PAD, DBH, DAU dan DAK)

Pengujian hubungan substruktural I dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2
Hasil Uji Path Analysis (Substruktural I)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.671290	1.499915	1.114256	0.2673
LN_PAD	0.128093	0.027942	4.584209	0.0000
LN_DBH	0.212886	0.022521	9.452858	0.0000
LN_DAU	0.582484	0.071791	8.113598	0.0000
LN_DAK	0.063691	0.011915	5.345345	0.0000
R-squared				0.866241
Prob(F-statistic)				0.000000

Sumber : hasil olah data dengan Eviews10, 2021

Pada tabel 2 menunjukkan nilai R² atau R-Square adalah sebesar 0,866241, yang artinya bahwa PAD, DBH, DAU, DAK memberikan kontribusi atau sumbangan pengaruh terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 86,6241% sementara sisanya 13,3759% adalah kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

2. Regresi Linier Substruktural II (Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DBH, DAU, DAK, dan Belanja Daerah)

Pengujian hubungan substruktural II dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel PAD, DBH, DAU, DAK serta Belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3
Hasil Uji Path Analysis (Substruktural II)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.60141	12.29105	4.442371	0.0000
LN_PAD	0.520400	0.246385	2.112139	0.0367
LN_DBH	-0.534355	0.240871	-2.218425	0.1284
LN_DAU	0.342108	0.724272	0.472347	0.6375
LN_DAK	-0.162840	0.107768	-1.511022	0.1333
LN_BELANJA_DAERAH	1.939241	0.732231	2.648402	0.0091
R-squared				0.289442
Prob(F-statistic)				0.000000

Sumber : hasil olah data dengan Eviews10, 2021

Tabel 3 menunjukkan nilai R² atau R-Square yang terdapat pada tabel 3 yaitu sebesar 0,289442, artinya kontribusi atau sumbangan pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 28,9442% sementara sisanya 71,0558% adalah kontribusi atau sumbangan dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,128093; t-hitung 4,584209 > 1,65666 t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikansi 5% sebesar 0,0000 < 0,05. Hubungan positif dan signifikan antara PAD dan Belanja Daerah ini sejalan dengan hukum Wagner. Yang menerangkan apabila terjadi peningkatan pendapatan perkapita, maka secara relatif akan terjadi peningkatan terhadap pengeluaran pemerintah (Mangkoesobroto, 1993:171 dalam Irvan & Karmini, 2013). Hasil penelitian ini searah

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Penatari (2015), Jumiaty et al., (2019), Ernayani (2017), dan Mawarni et al., (2013).

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Penelitian menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,212886; t-hitung $9,452858 > 1,65666$ t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikansi 5% sebesar $0,0000 < 0,05$. Hubungan positif dan signifikan antara DBH dan Belanja Daerah ini sejalan dengan pernyataan dari Holtz-Eakin et al (1994) dalam (Irvan & Karmini, 2013), yang menerangkan adanya hubungan yang kuat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja/pengeluaran dalam pemerintah daerah. DBH adalah Salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah yang cukup potensial untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan standar pelayanan publik. Dengan adanya penambahan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberikan pemerintah daerah kebijakan untuk melakukan pengelolaan sumber dayanya dengan seefektif dan seefisien mungkin agar dapat tercapainya peningkatan perekonomian salah satunya dengan pengalokasian sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya DBH ini diharapkan pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan melalui alokasi anggaran ke sektor Belanja Daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ernayani (2017).

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,582484; t-hitung $8,113598 > 1,65666$ t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikansi 5% sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal Ini sesuai dengan fungsi DAU yaitu untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Hubungan positif dan signifikan antara DAU dan Belanja Daerah ini sejalan dengan pernyataan dari Holtz-Eakin et al (1994) dalam (Irvan & Karmini, 2013), yang mengatakan bahwa adanya kontribusi yang kuat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja/pengeluaran dalam pemerintah daerah. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Penatari (2015) dan Dewi et al., (2017).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,063691; t-hitung $5,345345 > 1,65666$ t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikansi 5% sebesar $0,0000 < 0,05$. Ini berarti sesuai dengan konsen dari tujuan DAK yaitu untuk menekan ongkos dari urusan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. DAK yang didapat oleh pemerintah daerah diarahkan kepada pemanfaatan untuk kegiatan pemodaln pembangunan, penyediaan, pengembangan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan berkesinambungan, dengan pendayagunaan DAK yang direalisasikan dalam belanja daerah diharapkan dapat mampu meningkatkan standar pelayanan publik (Anggraeni dan Suhardjo dalam Talangamin et al., 2018). Hubungan positif dan signifikan antara DAK dan Belanja Daerah ini sejalan dengan pernyataan dari Holtz-Eakin et al (1994) dalam Irvan & Karmini (2013), yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara transfer

pemerintah pusat dengan belanja/pengeluaran dalam pemerintah daerah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Iqbal et al., (2020).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,520400; t-hitung $2,112139 > 1,65666$ t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikansi 5% sebesar $0,0367 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah, maka akan berpengaruh pada peningkatan nilai PDRB daerah tersebut. Sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi dari PAD tersebut, seperti dengan menambah skala belanja daerah yang lebih besar dalam meningkatkan pembangunan. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, maka akan mempengaruhi perekonomian suatu daerah dan akan berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2015), Talangamin et al. (2018), dan Siswiyanti (2017).

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar -0,534355; t-hitung $-2,218425 < 1,65666$ t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikansi 5% sebesar $0,1284 > 0,05$. Ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi DBH yang didapatkan pemerintah daerah maka akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan kurangnya kontribusi keseluruhan DBH terhadap peningkatan daerahnya. Kurang maksimalnya pengalokasian DBH dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta dalam membiayai infrastruktur seperti dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ekonomi. Karena dengan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi dapat menunjang roda perekonomian dalam pelaksanaan arus kegiatan barang dan jasa oleh pelaku ekonomi. Dengan, kurang maksimalnya penggunaan DBH ini, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih didukung dari dana alokasi yang lainnya.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,342108; t-hitung $0,472347 < 1,65666$ t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikansi 5% sebesar $0,6375 > 0,05$. Besaran target pembangunan daerah yang telah dianggarkan, dapat ditentukan dari banyaknya DAU yang diperoleh daerah. Ini tercermin dari belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, namun pengalokasian belanja daerah yang dianggarkan pada daerah penelitian cenderung untuk belanja yang tidak menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan belanja khusus urusan pemerintah daerah seperti belanja rutin pegawai dan yang lainnya. Hal ini diakibatkan dari DAU yang diterima oleh daerah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, sehingga peran DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi & Suputra (2017).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

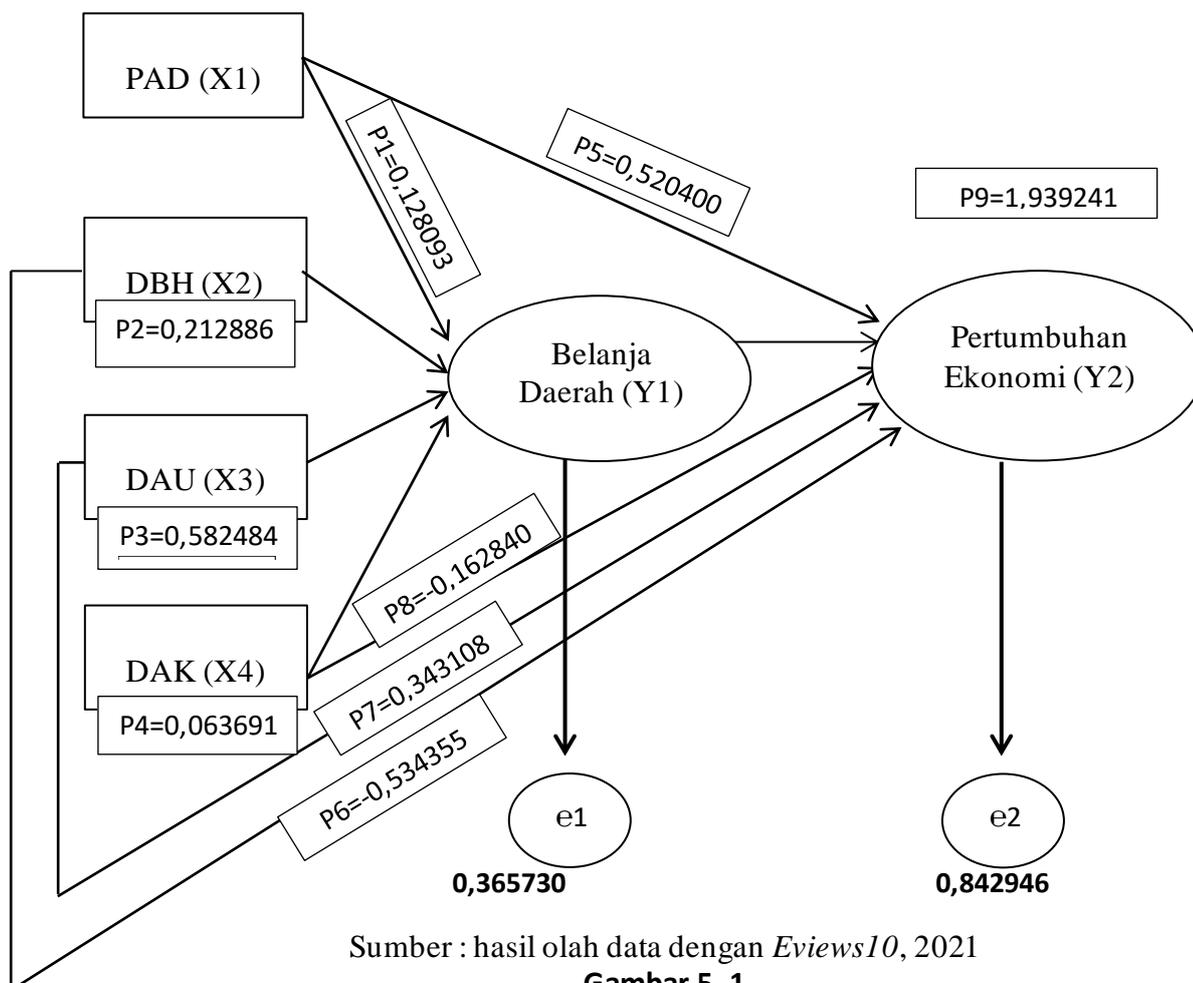
Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar $-0,162840$; t-hitung $-1,511022 < 1,65666$ t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikansi 5% sebesar $0,1333 > 0,05$. Artinya DAK yang diterima tidak digunakan secara keseluruhan untuk pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan Dana Alokasi Khusus yaitu untuk menekan ongkos dari urusan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. DAK yang diterima pemerintah daerah harusnya diarahkan kepada pemanfaatan untuk kegiatan pemodalangan pembangunan, penyediaan, pengembangan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan berkesinambungan, dengan pemanfaatan DAK yang direalisasikan dalam belanja daerah diharapkan dapat mampu meningkatkan standar pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan karakteristik DAK yang peruntukannya cukup spesifik ini, kurang efektifnya menggunakan DAK ini serta dengan adanya kebocoran maupun penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan dana dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadikan DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi & Suputra (2017).

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar $1,939241$; t-hitung $2,648402 > 1,65666$ t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikansi 5% sebesar $0,0091 < 0,05$. Artinya bahwa semakin tinggi belanja daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh komponen ekonomi makro, yakni pengeluaran pemerintah yaitu belanja daerah. Belanja pemerintah daerah merupakan stimulus dalam menggerakkan perekonomian yang dapat menjadi salah satu alat untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Semakin tinggi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pola konsumsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Romualda et al., (2019).

Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah

Gambar 1
Diagram Hasil Analisis Jalur



Sumber : hasil olah data dengan *Eviews10*, 2021

Gambar 5. 1
Diagram Koefisien Jalur

Untuk hasil pengujian pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah yang diperoleh dari perhitungan uji *sobel test*, dapat dilihat melalui tabel 4 pada kolom Z.

Tabel 4
Ringkasan Hasil Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Variabel	Variabel Mediasi	Z	Keterangan
X1 → Y2	Y1	2,253372697	Signifikan
X2 → Y2	Y1	2,537071408	Signifikan
X3 → Y2	Y1	2,500564972	Signifikan
X4 → Y2	Y1	2,340450056	Signifikan

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan semua hasil Z hitung lebih besar dari t tabel (N 130) dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,65666 maka dapat diambil kesimpulan bahwa koefisien mediasi berpengaruh secara signifikan. Artinya, belanja daerah dapat dijadikan sebagai variabel mediator antara PAD, DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini (1) Hasil Penelitian membuktikan bahwa Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK memiliki pengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya terdapat kontribusi yang sangat kuat antara penerimaan pemerintah dengan belanja/pengeluaran dalam pemerintah daerah. Ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah akan meningkatkan porsi belanja dalam pemerintah daerah. Sehingga diperlukan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengelola penerimaan daerahnya agar dapat dibelanjakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (2) Penelitian ini membuktikan bahwa PAD dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengalokasian belanja daerah dalam penyusunan APBD disesuaikan dengan mempertimbangkan PAD yang didapatkan oleh daerah. Ini menunjukkan tingginya PAD suatu daerah akan meningkatkan tingkat Belanja Daerah, dan tingginya Belanja Daerah akan berdampak pula pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Artinya, dengan meningkatnya belanja yang dilakukan oleh Pemda, sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat dan peningkatan pola konsumsi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. (3) Penelitian ini membuktikan bahwa DBH, DAU dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.. Hal ini disebabkan dalam rangka perwujudan desentralisasi dan pengadaan infrastruktur (sarana dan prasarana) dengan pengalokasian dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat (DBH, DAU, DAK) belum digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin untuk menunjang kegiatan perekonomian sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kurang efektifnya penggunaan DBH, DAU, dan DAK ini mengakibatkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan Penelitian

Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga tidak dapat memberikan gambaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi yang lainnya. Kedua, hasil R² atau R-Square yang terdapat pada model struktural II relatif kecil yaitu sebesar 0,289442 menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 28,9442% sementara sisanya 71,0558% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Ketiga, interpretasi hasil penelitian ini tidak didukung oleh pendalaman secara personal terhadap para pemangku kepentingan di daerah observasi, karena hanya menggunakan data sekunder..

Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan nilai R² atau R-Square sebesar 0,866241. Ini artinya, sumbangan atau pengaruh yang diberikan oleh variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK sebesar 86,6241% persen terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan hanya 13,3759% kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. (2) Variabel PAD dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Variabel DBH dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Variabel DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun bernilai positif

terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK diperoleh nilai R² atau R-Square sebesar 0,289442. Ini menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi dari variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK hanya sebesar 28,9442% terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya, masih terdapat variabel-variabel lain yang lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 84,2946% yang tidak termasuk kedalam model penelitian. (3) Variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga variabel Belanja Daerah mampu menjadi variabel mediator antara PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Saran

Saran yang dapat disampaikan yaitu, (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat menggali potensi daerahnya dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah untuk menggerakkan roda perekonomiannya, sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap PAD agar mampu mandiri dalam segi finansial untuk mendanai seluruh kegiatan dan aktivitas pemerintahan dalam pelaksanaan desentralisasi. (2) Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan penerimaannya baik berupa PAD maupun dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) dengan pengalokasian belanja daerah dengan sebijak mungkin untuk menunjang peningkatan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana publik agar berdampak pada peningkatan produktivitas publik dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian. Sehingga mampu turut serta dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. (3) Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan kinerja perangkat daerahnya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerahnya, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengalokasian belanja daerahnya. Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan ataupun penyelewengan terhadap penerimaan pemerintah yang digunakan dalam belanja daerah untuk menunjang sarana dan prasarana dalam rangka desentralisasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. (4) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya mengambil sampel selain Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya dapat dibandingkan apakah hasil penelitian ini dapat berlaku pada Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Serta, mengambil variabel lain yang mampu memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, S. A. F., & Nuraini, I. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2000), 500–513.
- Azzahra, A. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2012*. 1–27.
- Dewi, K. R., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) DAN Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Bali (Periode Tahun 2012-2015). *Jurnal Riset Akuntansi JUARA-Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 7(1), 180–188.
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

- Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 1745–1773. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3321>
- Djayanthi, M. R., & Juniarti. (2020). The Effect of Regional Original Income, Balancing Fund and Capital Expenditure on Regional Economic Growth in Dki Jakarta Province. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–14.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Hendawati, H., Komarasakti, D., & Ansori, S. (2018). *The Effect of Capital Cost and General Allocation Fund To The Regional Financial Independence in Bandung City Government*. 1(2), 141–149.
- Hutabarat, F. M., & Kumendong, F. F. (2020). Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 50–56. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1880>
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah* (Vol. 55).
- Iqbal, M., Tarmizi, A., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*, 5(2), 1–13.
- Irvan, I. P., & Karmini, N. L. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udaya*, 5(3), 338–362.
- Jumiati, E., Indriani, M., & Darwanis, D. (2019). The Influence of Regional Revenue, Balancing Funds, Special Autonomic Funds, and Economic Growth on Capital Expenditures Allocation. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(2), 90–96. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v2i2.14317>
- Krismajaya, I. P., & Dewi, N. P. M. (2019). Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi terhadap Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(6), 1390–1422.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–11. <http://eprints.umm.ac.id/57958/7/Kusuma - Fiscal Decentralization Fund Transfers Economic Growth Panel Data.pdf>
- Mahardika, I. G. N. S., & Sri Artini, L. G. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3(3), 245124.

- Mawarni, Darwanis, & Syukriy, A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2*, (November 2019), 80–90.
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 104. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122>
- Penatari, R. I. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis-Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1189–1197.
- Permanasari, W. A. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis-Universitas Muhammadiyah Surakarta*. http://eprints.ums.ac.id/25969/13/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 811–827.
- Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 5(2), 173–186. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340>
- Romualda, V., Bella, G., & Apriyanto, G. (2019). Impact of pure regional income (PAD), general allocation funds (DAU) and special allocation funds (DAK) toward capital expenditures and its impact on economic growth (Case Study of Local Government in Malang Area). *International Journal of Academic Research and Development*, 4(6), 10–19. www.academicjournal.in
- Saleh. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun . *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi-Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sari, E. T. I., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(5), 1977–1994.
- Sarwono Jonathan. (2007). *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS* (Triyuliana Agnes Heni (ed.)). CV ANDI OFFSET.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228.

<https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>

Siswiyanti, P. (2017). Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-17>

Talangamin, O. B., Kindangen, P. ., & Koleangan, R. A. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1–11. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19897.19.7.2018>